

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses pesta demokrasi untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut, mulai dari presiden, gubernur, walikota, bupati, dan wakil rakyat sampai kepala desa. Pemilu bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan Rakyat dan melaksanakan pergantian personal pemerintahan secara damai, aman dan tertib. Pemilu juga sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni Tahun 2005.¹

Pelaksanaan Pilkada pertama kali dilakukan di provinsi Maluku Utara secara langsung pada tahun 2007-2008 mengharapkan agar berjalan dengan lancar namun masih saja mengisyaratkan berbagai macam “konflik” baik, pada pra

¹ Asmawati Ilyas. Skripsi, Manajemen konflik partai golkar pada pemilukada kab. Pinrang tahun 2013, Program Studi Ilmu Politik, Jurusan Politik Dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: Universitas Hasanudin, 2014 Hlm 8

pemilihan, saat pemilihan, maupun pasca pemilihan. Kemunculan konflik-konflik lokal di berbagai daerah dalam menghadapi arus demokrasi langsung tersebut, sulit untuk dihindari. Konflik pada saat pilkada sering muncul di salah satu daerah dan tak terkecuali di provinsi Maluku Utara dan lebih khusus lagi yang ada di Kota Tidore Kepulauan. Mana Kota Tidore merupakan daerah aman dan damai namun jika dihubungkan dengan masalah pilkada tentunya tidak bisa dipungkiri karena pasti adanya konflik saat pilkada dan pasca pilkada. Umumnya konflik politik terjadi dikarenakan para elite-elite di Kota Tidore selalu mementingkan kepentingan mereka dan mengutamakan isu-isu etnisitas. Hal ini dikarenakan jika memiliki kekuatan etnisitas pada tingkat lokal tentunya di pengaruhi oleh kepentingan nasional, sehingga untuk meloloskan kepentingannya maka, isu etnisitas dipandang lebih mempunyai peluang. Untuk itu, proses penggarapan dukungan massa menjadi target utama propaganda elit, sehingga isu etnisitas dapat terus direproduksi dan dimainkan dengan secara masif.

Sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penetapan untuk umumkan hasil pilkada yang mana di uraikan (Haris:2005). *Pertama*, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah, dan darah. *Kedua*, konflik yang bersumber dari mendiskriminasi antarpasangan calon kepala daerah. *Ketiga*, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. *Keempat*, konflik yang bersumber dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pilkada. *Kelima*, konflik yang bersumber dari perbedaan

penafsiran terhadap aturan main penyelenggaraan pilkada.² Dari kelima uraian diatas dapat dihubungkan dengan peristiwa dan konflik baik saat pilkada maupun pasca pilkada namun yang sering terjadi yaitu disaat pasca pilkada. Uraian yang dikemukakan diatas juga yang sering terjadi terutama para elite-elite di Tidore selalu memprioritaskan etnisitanya kemudian saling mendiskriminasi antar pendukung massa atau pasangan calon kandidatnya dan dengan cara itulah untuk mendapatkan kedudukan.

Bukan hanya mengenai etnisitas yang sering dipertahankan oleh para elite-elite dan masyarakat di Kota Tidore namun, banyak persoalan yang menimbulkan konflik seperti telah di uraikan oleh (Haris:2005) diatas sering terjadi di Tidore. Jika masyarakat dan para elite-elite di Kota Tidore selalu berprinsip seperti itu maka selalu memicu terjadinya konflik di setiap pasca pilkada. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan konflik sering terjadi dan akan berujung ke perkelahian, kekerasan, perdebatan dan lain sebagainya. Konflik seperti ini dapat merugikan orang banyak maupun diri mereka sendiri karena terkadang konflik yang sering terjadi pada psca pilkada berujung pula ke ranah hukum atau pengadilan. Terkadang konflik ini juga melibatkan oknum-oknum tertentu dalam Masyarakat dan elite politik partai pendukung. Meskipun disadari bahwa konflik dalam Pasca pilkada merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan, namun tentu saja peristiwa sosial semacam itu tidak boleh dibiarkan. Keteraturan sosial (*social order*) atau dalam tataran yang lebih makro yakni integrasi bangsa tetap menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

² Wahyudi. 2010. Jurnal, Fungsi Desk Pilkada dan Model Pengelolaan Konflik Pilkada, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 18

Berdasarkan dari hasil penelitian, konflik terjadi dalam masyarakat pasca pilkada pada tanggal 20 Desember tahun 2015 periode 2015-2020. Dari pasangan calon kedua kandidat Nasdem maupun Golkar terjadi konflik antara dua kelurahan yaitu kelurahan Gurabati dan Tongowai yang mana karena adanya ketidakpuasan hasil KPU, dan konfui atau pawe antara masing-masing kandidat juga massanya yang pada akhirnya menimbulkan sifat saling irih atau sentimen, mendiskriminasi antara massa yang satu dengan yang lainnya, dan juga saling memprofokasi.

Masing-masing pendukung kandidat saling bertikaian, saling melempar, dan perkelahian menggunakan kekerasan yang pada akhirnya sampai ada yang terluka dan masuk ke rumah sakit baik dari masing-masing pendukung atau massa. Konflik ini setelah penetapan KPU atau pasca pilkada mengenai pemimpin daerah yaitu Walikota Tidore Kepulauan yang jatuh pada tanggal 20 Desember 2015. Setelah mengetahui siapa pemenang yang terpilih menjadi walikota dan pada hari yang sama pula pihak pemegang dari kandidat Gurabati melakukan konfui atau pawai kemenangan mereka. Pada saat itu pastinya para massa dari Tongowai menjadi irih/sentimen terhadap Gurabati dan juga tidak terimah atau tidak puas dengan penetapan/keputusan KPU tersebut. Namun ada lagi yang membuat masyarakat Tongowai sakit hati dan tidak terima sampai terjadinya perkelahian antara mereka yaitu dikarenakan Masyarakat Gurabati membuat onar dengan cara melempar Ibu-ibu Tongowai menggunakan gelas aqua dan mengeluarkan kata kotor untuk kandidat no 3 dari Tongowai. Kejadian seperti ini juga dibawah sampai ke pihak yang berwewenang atau pihak yang berwajib dan

pihak pendukung dari tongowai pun ada yang masuk penjara setelah kejadian tersebut. Konflik tersebut sampai saat ini jika di lihat dari kaca mata sosial masih ada keretakan hubungan dan sentimen antara mereka dan juga saling menjatuhkan yang mana, terjadi mutasi besar-besaran bagi para PNS (Pegawai Negeri Sipil) ke daerah-daerah terpencil dan juga rotasi jabatan akan selalu terjadi oleh golongan yang memegang tapuk kekuasaan. Namun, keadaan ini tidak mempengaruhi ikatan emosional atau kekeluargaan diantara mereka. Hal inilah sehingga peneliti pun tertarik dan mengangkatnya menjadi sebuah penelitian terhadap konflik yang terjadi di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Adapun fokus yang menjadi batasan penelitian disini yaitu penyebab konflik pasca pilkada antara dua kelurahan pada tanggal 20 Desember 2015. Adapun formulasi judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: **“Konflik Masyarakat Tidore Pasca Pilkada Tahun 2015 studi konflik antar dua Kelurahan, di Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan”**.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut yaitu Bagaimana penyebab terjadinya konflik pada saat pasca pilkada di Kota Tidore Kepulauan?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut yaitu mengetahui bagaimana penyebab terjadinya konflik pada masyarakat Gurabati dan Tongowai pasca pilkada di Kota Tidore Kepulauan dan mengetahui bagaimana keadaan masyarakat sebelum konflik dan sesudah konflik.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan lewat penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan bagaimana penyebab terjadinya konflik Masyarakat Tidore pasca pilkada antar kelurahan Gurabati dan Tongowai.
2. Dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan yang pada prinsipnya berkaitan dengan masalah yang sudah diteliti.